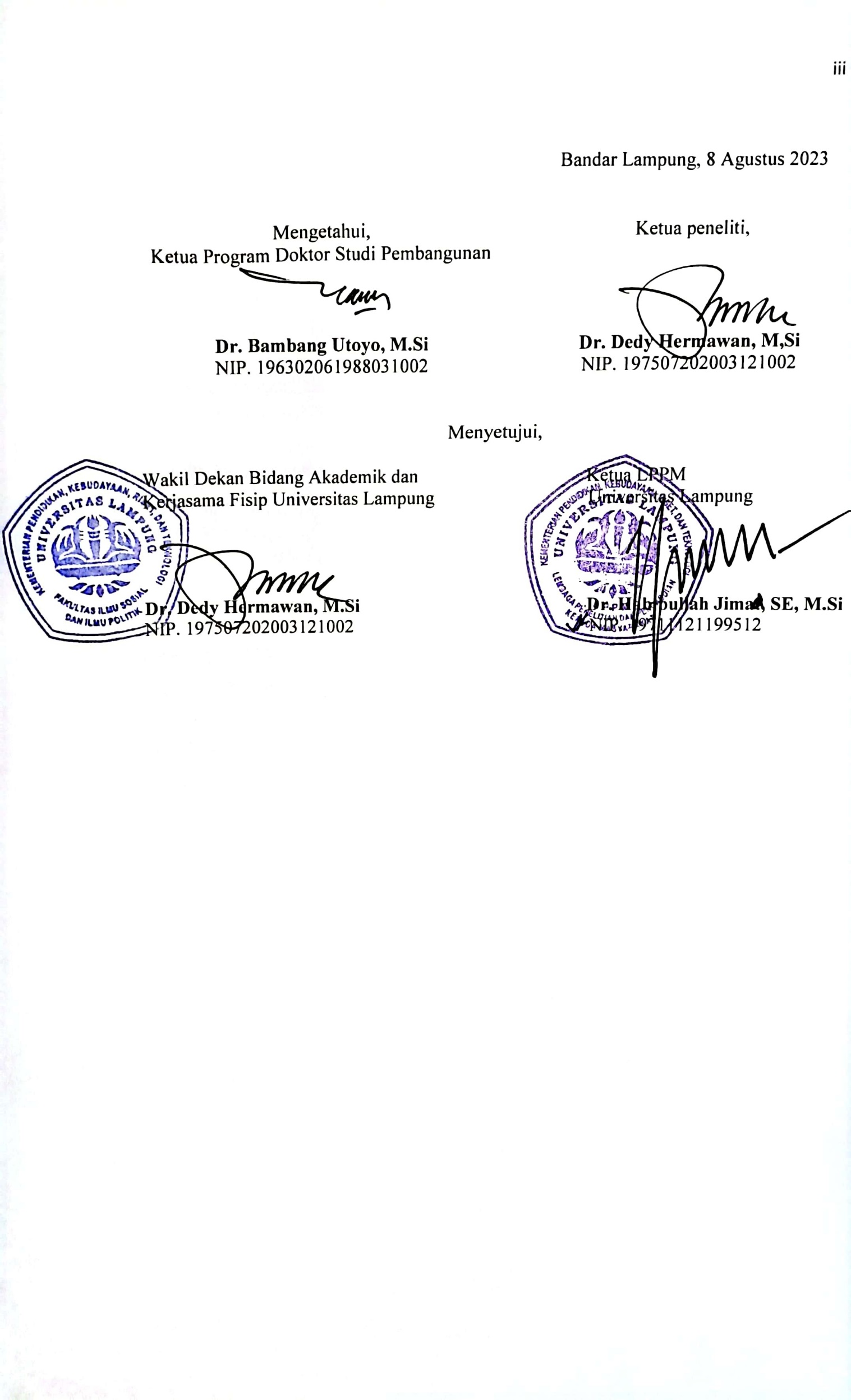


# HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR

**PENELITIAN DIPA FISIP UNIVERSITAS LAMPUNG**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Judul penelitian | : | Rasionalitas Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Di Provinsi Lampung (Kenyataan dan Harapan) |
| Manfaat sosial ekonomi | : | 1. Berkontribusi dalam perdebatan ilmiah tentang rasionalitas kebijakan desentralisasi pendidikan. 2. Memberikan identifikasi terkait faktor-faktor yang berkontribusi dalam proses desentralisasi pendidikan. |
| **Ketua peneliti** |  |  |
| 1. Nama lengkap | : | Dr. Dedy Hermawan, M. Si |
| 1. SINTA IDE | : | 6119669 |
| 1. Jabatan fungsional | : | Lektor Kepala |
| 1. Program studi | : | Ilmu Administrasi Negara |
| 1. Nomor HP | : | 0811721883 |
| 1. Email | : | [dedy.hermawan@fisip.unila.ac.id](mailto:dedy.hermawan@fisip.unila.ac.id) |
| **Anggota peneliti I** |  |  |
| 1. Nama lengkap | : | Prof. Dr. Hartoyo, M.Si |
| 1. SINTA IDE | : | 6016760 |
| 1. Jabatan fungsional | : | Guru Besar |
| 1. Program studi | : | Sosiologi |
| 1. Nomor HP | : | 08127937553 |
| **Anggota peneliti II** |  |  |
| 1. Nama lengkap | : | Dr. Feni Rosalia, M. Si |
| 1. SINTA IDE | : | 6039509 |
| 1. Jabatan fungsional | : | Lektor Kepala |
| 1. Program studi | : | Ilmu Pemerintahan |
| 1. Nomor HP | : | 082186448015 |
| **Anggota peneliti III** |  |  |
| 1. Nama lengkap | : | Dr. Tina Kartika, M.Si |
| 1. SINTA IDE | : | 6042602 |
| 1. Jabatan fungsional | : | Lektor Kepala |
| 1. Program studi | : | Ilmu Komunikasi |
| 1. Nomor HP | : | 081271954649 |
| Jumlah mahasiswa yang terlibat | : | Darmawan Purba NPM 2236011008  Ahmad Riza Faisal NPM 2236011007 |
| Jumlah alumni yang terlibat | : | - |
| Jumlah staf yang terlibat | : | - |
| Lokasi kegiatan | : | Pemerintah Provinsi Lampung |
| Lama kegiatan | : | 6 (enam) bulan |
| Biaya penelitian | : | Rp 20.000.000 |
| Sumber dana | : | DIPA FISIP UNILA 2023 |



# RINGKASAN

Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 9 tahun 2016 mengatur peralihan kewenangan pendidikan dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi. Terdapat beberapa permasalahan seperti rendahnya angka partisipasi sekolah, masalah guru dan sekolah terpencil, minimnya pendanaan pendidikan, pengurusan adminstrasi guru, dan sebagainya. Tulisan ini untuk menggambarkan kenyataan, harapan dan rasionalitas desentralisasi pendidikan, apakah masuk pada katagori rasional atau sebaliknya, dengan menggunakan. teori rasionalitas Max Weber : Rasionalitas Instrumental (*Instrumental Rationality),* Rasionalita nilai *(Value Oriented Rationality),*Rasionalitas Afektif (*Affcative Rationality*), dan Rasionalitas Tradisional (*Traditional Rationality*).

Tipe Penelitian deskriptif kualitatif untuk menggambarkan fenomena kenyataan dan harapan serta rasionalitas desentralisasi pendidikan di Provinsi Lampung. Pengumpulan data melalui wawancara kepada informan secara *purposive.* yaitu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, guru, murid, orangtua murid, akademisi, dan pemerhati masalah pendidikan. Observasi untuk mengkonfirmasi kebijakan desentralisasi pendidikan berproses dalam kegiatan pendidikan.

Hasil penelitian menggambarkan pada kenyataannya kebijakan desentralisasi pendidikan di Provinsi Lampung adalah rasional. Berdasarkan teori instrumental dengan jaminan biaya pendidikan (sekolah gratis), prasarana pendidikan dan beasiswa pendidikan dapat menunjang kemampuan kebijakan desentralisasi. Rasionalitas pada nilai di mana individu dalam pengambilan keputusan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan pendidikannya tergolong stabil pada tingkatan pendidikan dasar di provinsi Lampung. Pada Rasional afektif kondisi antara objek dari individu pendidikan seperti murid dan guru merupakan ujung tombak pendidikan pada level bawah, tenaga pendidikan harus membentuk karakter muridnya selaras dengan merdeka belajar di dunia pendidikan. Tetapi pada rasionalitas tradisional yaitu adat, suku, dan agama tidak berpengaruh pada kebijakan desentralisasi pendidikan. Harapan ke depan bahwa desentralisasi pendidikan di Provinsi Lampung perlu penguatan komitmen dari setiap daerah agar terselenggara pendidikan yang berkemajuan secara merata dan tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah daerah.

Kata Kunci : Rasionalitas, Desentralisasi Pendidikan

# BAB I. PENDAHULUAN

1. **Latar Belakang Masalah**

Desentralisasi Pemerintahan pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan- tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, suatu masyarakat yang lebih adil dan lebih sejahtera. Menurut Undang-Undang Pemerintah Daerah nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintah Pusat kepada daerah berdasarkan asas otonom, sehingga ketentuan ini menjadi dasar hukum terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam menjalankan urusan-urusannya. Indonesia merupakan Negara yang menerapkan sistem desentralisasi yang pada hakikatnya desentralisasi adalah hak otonomisasi suatu masyarakat dalam wilayah tertentu. Pemerintah daerah dianggap dapat lebih memahami keinginan penduduk lokal sehingga pengambilan keputusan dalam penyediaan pelayanan lebih responsif terhadap permintaan masyarakat (Utomo 2008: 78).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana Pemerintahan meletakkan titik berat otonomi pada daerah kabupaten dan daerah kota dengan tujuan untuk lebih mendekatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat (pelayanan publik) dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, aman, dan demokratis sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

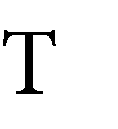
yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

UUD 1945 Pasal 31 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan sehat. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pendidikan merupakan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemerintah sebagai instansi penyedia pelayanan publik wajib menyusun standar pelayanan masing-masing sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Adanya perubahan Undang-Undang dari UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membuat beberapa kebijakan ikut mengalami perubahan. Salah satunya terkait pengelolaan pendidikan menengah yang semula dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota beralih menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Ketentuan terkait kewenangan pendidikan menengah ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMK/SMA) Dari Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung.

Sejak terjadinya peralihan kewenangan pendidikan pada tahun 2016, di satu sisi memberikan keuntungan bagi pemerintah kabupaten/kota, karena dapat lebih fokus kepada pengelolaan pendidikan dasar saja, sedangkan pemerintah provinsi dapat menangani pendidikan menengah. Namun, tetap saja hal ini menimbulkan pendapat pro kontra dari berbagai pihak, seperti orang tua murid maupun para tenaga pendidik. Hal ini karena terdapat berbagai perubahan kebijakan yang dirasa belum sepenuhnya berjalan optimal.

Melihat kondisi pendidikan di Provinsi Lampung belum sepenuhnya berada dalam kondisi yang baik. erdapat beberapa daerah berada dalam Indeks

Pertumbuhan Masyarakat (IPM) masih rendah.1 Hal ini mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Kabupaten berupaya meningkatkan IPM kategori Pendidikan agar masyarakat berada dalam kondisi yang maju dalam level pendidikannya.

# Tabel 1. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kab/Kota di Provinsi Lampung (2019)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kabupaten/ Kota** | **% (SD)** | **% (SMP)** | **% (SMA)** |
| 1. | Lampung Selatan | 99,80 | 93,42 | 75,90 |
| 2. | Lampung Barat | 100 | 95,25 | 69,29 |
| 3. | Pesawaran | 100 | 96,08 | 71,88 |
| 4. | Pringsewu | 99,62 | 98,68 | 74,08 |
| 5. | Lampung Timur | 99,80 | 94,61 | 66,58 |
| 6. | Lampung Tengah | 99,74 | 96,43 | 68,56 |
| 7. | Way Kanan | 99,82 | 96,31 | 67,70 |
| 8. | Tulang Bawang  Barat | 99,67 | 93,18 | 74,44 |
| 9. | Lampung Utara | 99,84 | 94,78 | 72,41 |
| 10. | Tulang Bawang | 99,73 | 94,23 | 68,85 |
| 11. | Bandar Lampung | 99,98 | 98,24 | 76,86 |
| 12. | Metro | 99,90 | 95,31 | 84,09 |
| 13. | Mesuji | 99,26 | 89,36 | 64,15 |
| 14. | Tanggamus | 99,56 | 90,95 | 72,02 |
| 15. | Pesisir Barat | 99,80 | 86,73 | 65,85 |

*(Sumber: BPS Provinsi Lampung 2019)*

Seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan, Angka Partisipasi Sekolah (APS) cenderung menurun. Pada jenjang SMA/sederajat ke atas misalnya, kabupaten/kota berkisar antara 64-84 persen. Hasil angka partisipasi sekolah di Provinsi Lampung tahun 2019 dapat dilihat bahwa Kabupaten Mesuji berada dalam persentase terendah mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sedangkan di daerah kota, APS relatif

1 <https://ipm.bps.go.id/data/kabkot/metode/baru/1881>

lebih tinggi di Kota Metro mencapai 84 persen sementara di Kota Bandar Lampung hampir 77 persen.

Sampai saat ini masih banyak permasalahan terkait pendidikan di Provinsi Lampung. Masih rendahnya minat pendidikan di Provinsi Lampung antara lain karena ketidakmampuan ekonomi rumah tangga, aksesibilitas sarana pendidikan, pendidikan orang tua, kualitas guru, dan lainnya. Berbagai argumentasi disampaikan terkait permasalahan tersebut. Ada yang berpandangan bahwa masalah pendidikan di Lampung akibat peralihan kewenangan pendidikan dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi Lampung. Sebagian masyarakat juga beranggapan bahwa peralihan kewenangan tersebut justru membawa pendidikan di Provinsi Lampung menjadi semakin maju.

Mengingat masih adanya pro kontra di masyarakat tentang alih kewenangan pendidikan dari Kabupaten/Kota kepada provinsi ditambah dengan banyaknya permasalahan pendidikan seperti angka partisipasi sekolah yang masih rendah, ketidakmerataan pendidikan di daerah terpencil, akses pengurusan administratif para guru di daerah, dan lain-lain maka perlu dilihat rasionalitas kebijakan desentralisasi pendidikan, sampai sejauh ini bagaimana perkembangannya, apa yang menjadi kenyataan dan bagaimana pula harapan ke depannya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan melakukan kajian tentang “Rasionalitas Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Di Provinsi Lampung (Kenyataan dan Harapan)”

# Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas peniliti merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

* 1. Bagaimana kenyataan yang terjadi sejak berlakunya desentralisasi pendidikan di Provinsi Lampung ?
  2. Bagaimanakah rasionalitas Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Di Provinsi Lampung ?
  3. Bagaimana harapan ke depan berkaitan dengan desentralisasi pendidikan di Provinsi Lampung ?

# Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

* 1. Kenyataan yang terjadi sejak berlakunya desentralisasi pendidikan di Provinsi Lampung.
  2. Rasionalitas Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Di Provinsi Lampung.
  3. Harapan ke depan berkaitan dengan desentralisasi pendidikan di Provinsi Lampung.

# Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini meliputi kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

* 1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dalam kajian Ilmu Pemerintahan, khususnya kajian tentang pelaksanaan desentralisasi.
  2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Selanjutnya menjadi salah satu sumber bacaan bagi pihak- pihak yang akan melakukan penelitian dengan mengambil kajian atau topik tentang pelaksanaan desentralisasi pada masa-masa yang akan datang.

# BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

1. **Tinjauan Tentang Desentralisasi Pendidikan**

Secara etimologi istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu ”de” berarti lepas dan centrum berani pusat. Jadi menurut perkataan berasal dari desentralisasi adalah melepaskan dari pusat. Desentralisasi dalam arti self *Government* menurut Smith dalam Khairul Muluk berkaitan dengan adanya subsidi teritori yang memiliki *self government* melalui lembaga politik yang akan direkrut secara demokratis sesuai dengan batas yuridiksinya. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat daerah baik provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan atas daerah pemilihan yang mencerminkan aspirasi rakyat di daerah pemilihan tenentu. Karena dewan perwakilan rakyat daerah merupakan elemen dalam penyelenggraaan pemerintahan di daerah.

Desentralisasi berarti memberikan sebagian dari wewenang pemerintahan pusat kepada daerah, untuk melaksanakan dan menyelesaikan urusan yang menjadi tanggung jawab dan menyangkut kepentingan daerah yang bersangkutan (otonomi). Urusan yang menyangkut kepentingan dan tanggung jawab daerah meliputi : urusan umum dan pemerintahan, penyelesaian fasilitas pelayanan dan urusan sosial, budaya, agama dan kemasyarakatan.

Penyerahan urusan pemerintahan lebih lanjut menurut (Sunarno. 2011:87) menjelaskan bahwa desentralisasi berarti pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkup pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah, Desentralisasi seringkali disebut pemberian otonomi. Dengan kata lain, bahwa desentralisasi merupakan penotonomian menyangkut proses memberikan otonomi kepada masyarakat dalam wilayah tertentu.

Sesuai dengan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kebebasan dan kemadirian yang seluasluasnya dilakukan oleh pemerintahan daerah. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh kepala daerah yang memiliki fungsi atau bidang

pekerjaan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi sesuai dengan demokrasi.

Hubungan pusat dan daerah atas dasar otonomi teritorial merupakan konsep dalam negara kesatuan. Satuan otonomi teritorial merupakan suatu satuan mandiri dalam lingkungan negara kesatuan yang berhak melakukan tindakan hukum sebagai subyek hukum untuk mengatur dan mengurus fungsi pemerintahan (administrasi negara) yang menjadi urusan rumah tangganya. Jadi, hubungan Pusat dan Daerah atas dasar otonomi teritorial memiliki kesamaan dengan hubungan pusat da daerah atas dasar federal yaitu hubungan antara dua subyek hukum yang masing-masing berdiri sendiri.

Perbedannya, dalam otonomi teritorial, pada dasarnya seluruh fungsi kenegaraan dan pemerintahan ada dalam lingkungan pemerintah pusat yang kemudian dipencarkan kepada satuan-satuan otonomi. Pemencaran ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, undangundang menetapkan secara tegas berbagai fungsi pemerintahan. Lebih jauh Amrah Muslimin membedakan desentralisasi menjadi tiga macam, yaitu: desentralisasi politik, fungsional dan kebudayaan.

Desentralisasi politik adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat, yang menimbulkan hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah-daerah, yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu. Desentralisasi fungsionil adalah pemberian hak dan kewenangan pada golongan-golongan mengurus suatu macam atau golongan kepentingan pada masyarakat, baik terikat ataupun tidak, seperti mengurus kepentingan irigasi bagi golongan tani dalam suatu atau beberapa daerah tertentu. Desentralisasi kebudayaan memberikan hak pada golongan-golongan kecil dalam masyarakat (minoritas) menyelenggarakan kebudayannya sendiri (mengatur pendidikan, agama, dll.).

Pendidikan Menurut Djumali dkk (2014: 1), adalah untuk mempersiapkan manusia dalam memecahkan problem kehidupan di masa kini maupun di masa yang akan datang”. kemudian Menurut Sutrisno (2016: 29), pendidikan merupakan aktivitas yang bertautan, dan meliputi berbagai unsur yang berhubungan erat antara unsur satu dengan unsur yang lain. Pendidikan juga

memiliki definisi secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan bagi dirinya, masyarakat, dan bangsa.

Menurut Kurniawan (2017: 26), pendidikan adalah mengalihkan nilai-nilai, pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan kepada generasi muda sebagai usaha generasi tua dalam menyiapkan fungsi hidup generasi selanjutnya, baik jasmani maupun rohani. H. Mangun Budiyanto sebagaimana dikutip oleh Kurniawan (2017: 27), “berpendapat bahwa pendidikan adalah mempersiapkan dan menumbuhkan anak didik atau individu menusia yang proses berlangsung secara terus-menerus sejak ia lahir sampai ia meninggal dunia”.

Menurut Trahati (2015: 11), pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan manusia secara sadar dan terprogram guna membangun personalitas yang baik dan mengembangkan kemampuan atau bakat yang ada pada diri individu manusia agar mencapai tujuan atau target tertentu dalam menjalani hidup. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha menyiapkan dan membekali generasi muda ilmu pengetahuan, pengalaman dan kemampuan dalam memecahkan masalah yang prosesnya berlangsung sejak lahir hingga akhir hayat, baik jasmani maupun rohani.

Undang–Undang Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 13, yang dimaksud dengan jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pasal 14 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan dasar (Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama), pendidikan menengah (Sekolah Menengah Tingkat Atas), pendidikan tinggi (Diploma, Magister, Spesialis dan Doktor).

Desentralisasi pendidikan adalah sistem pengaturan pelaksanaan pendidikan yang diserahkan kepada masing-masing daerah otonom. Ali (2017: 31) mengatakan bahwa sistem desentralisasi pendidikan adalah kebijakan yang tepat diterapkan di Indonesia, alasannya adalah:

* 1. Kemampuan daerah dalam membiayai pendidikan
  2. Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dari masing-masing daerah
  3. Redistribusi kekuatan politik
  4. Peningkatan kualitas pendidikan
  5. Peningkatan inovasi dalam rangka pemuasan harapan seluruh warga

# Rasionalitas

Bentuk rasionalitas manusia berkaitan dengan tindakan yang mendukung suatu kehidupan, artinya bahwa ketika manusia melakukan suatu tindakan maka seharusnnya mengetahui secara fisik apa alat yang akan digunakan untuk mencapai suatu keinginan dalam kehidupannya. Menurut Max Weber (dalam Irwan 2016:20) Rasionalitas merupakan konsep dasar yang weber gunakan dalam klasifikasi mengenai tipe-tipe tindakan sosial. Pembedaan pokok yang non rasional singkatnya, tindakan rasional berhubung dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan.atas dasar rasionalitas tindakan sosial. Sementara itu menurut (Scott, 2012:54) rasionalitas dipahami sebagai individu yang menjadi agen selalu berusaha untuk memaksimalkan utilitas yang diterima dalam aktivitas produktif dan hubungan pertukaran serta menganggap keteraturan sosial adalah resultan kompleks dari tindakan individu. Interaksi sosial menjadi dasar suatu tindakan yang berjalan sesuai dengan pengelaman, persepsi, pemahaman dan atas suatu objek stimulus atau situasi tertentu. Pengertian rasionalitas di atas dapat diartikan suatu prilaku manusia secara sosial yang bersamaan untuk mencapai tujuan kegiatan produktif dan ketercapaian keteraturan sosial. Struktur sosial dan pranata sosial berkaitan dalam membentuk tindakan sosial jika konsep realitas sosial saling berkaitan membentuk tindakan sosial.

Max Weber (dalam Irwan 2016:20) membedakannya ke dalam empat tipe:

1. Rasionalitas Instrumental (*Instrumental Rationality),*

tindakan ditentukan atas dasar harapan yang memiliki tujuan untuk dicapai dan menentukan nilai dari tujuan itu sendiri. Tindakan dapat dipahami karena itu dapat dikatakan rasional. Tujuan tindakan adalah menentukan alat dan tujuan yang akan digunakan dalam mencapai suatu tujuan yang akan dicapai.

1. Rasionalitas berorientasi pada nilai (Value Oriented Rationality),

tindakan dalam rasionalitas ada pada nilai sebagai potensi atau tujuan hidup, walaupun tujuan tidak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan yang dilakukan oleh seseorang bukan hanya menilai cara yang baik, tetapi

menentukan nilai tujuan tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh aktor ada nilai-nilai yang dianut dan dijadikan pegangan hidup mereka. Tindakan yang didasarkan oleh kesadaran keyakinan mengenai nilai-nilai yang penting seperti etika, estetika, agama dan nilai-nilai lainnya yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Tindakan ini termasuk kedalam tindakan yang rasional sebab tindakan ini masih dapat dipahami.

1. Rasionalitas Afektif (*Affcative Rationality*),

tindakan yang ditentukan oleh kondisi kejiwaan dan perasaan individu yang melakukannya. Tindakan ini dilakukan seseorang berdasarkan perasaan yang dimilikinya, biasanya timbul secara spontan begitu mengalami suatu kejadian. Untuk tindakan yang didasari atas perasaan individu ini sukar dipahami sebab kurang rasional.

1. Rasionalitas Tradisional (*Traditional Rationality*),

Bertujuan untuk memperjuangkan tradisi atau nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat selama masyarakat itu berada. Hal tersebut mempertahankan suatu kebudayaan atau nilai yang diyakini dan ditekuni ketika individu melakukan tindakan oleh masyarakat telah menjadi darah daging. Tipe tindakan yang dilakukan yaitu memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang dan atas dasar tradisi atau adat istiadat tindakan ini pun sukar dipahami karena kurang rasional dan menempatkan masyarakat dalam situasi yang kompetitif, anonim dan terbagi-bagi.

Konsep rasionalitas merupakan kunci bagi suatu analisa obyekif mengenai arti-arti subjektif dan juga merupakan dasar perbandingan mengenai jenis-jenis tindakan social yang berbeda. Weber melihat kenyataan sosisal sebagai sesuatu yang didasarkan pada motivasi individu dan tindakan sosial. Inti dari teori weber adalah bahwa tindakan sosial, apapun wujudnya hanya dapat dimengerti menrut arti subjektif dan motivasi apa yang mendasarinya. Artinya, setiap tindakan yang dilakukan oleh individu hanya individu itu sendiri yang mengerti. Karena tidak selalu semua perilaku dapat dimengerti sebagai suatu manifestasi rasionalitas. Untuk mengetahui arti subjektif dan motivasi individu yang bertindak, yang diperlukan adalah kemampuan untuk berempati pada peranan orang lain.

# Kerangka Pikir

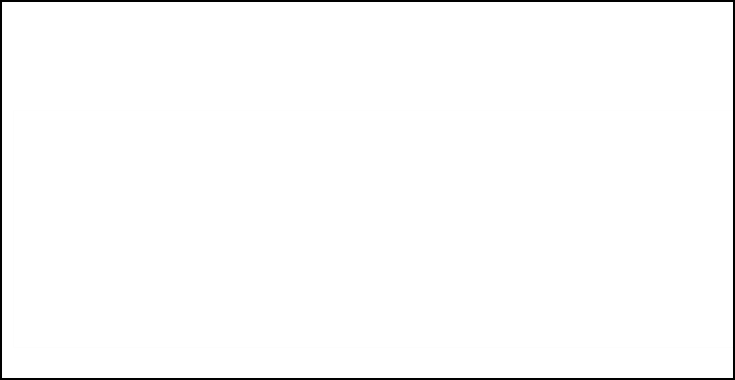
Desentralisasi pendidikan adalah sistem pengaturan pelaksanaan pendidikan yang diserahkan kepada masing-masing daerah otonom. Desentralisasi pendidikan merupakan sebuah proses yang kompleks dan dapat membawa perubahan- perubahan penting tentang cara sistem pendidikan menciptakan kebijakan, mendapatkan sumber daya, mengeluarkan dana, melatih guru, menyusun kurikulum, dan mengelola sekolah-sekolah. Dengan demikian menurut Ali (2017:31) desentralisasi pendidikan perlu diberlakukan karena berkaitan dengan :

1. Kemampuan daerah dalam membiayai pendidikan
2. Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dari masing- masing daerah
3. Redistribusi kekuatan politik, dan
4. Peningkatan kualitas pendidikan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan desentralisasi pendidikan dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi. Sebagai pelaksanaan UU tersebut, maka terbitlah Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 9 tahun 2016 yang mengatur tentang peralihan kewenangan pendidikan tersebut. Sejak berlakunya Perda tersebut hingga saat ini masih terdapat beberapa permasalahan terkait pendidikan di Provinsi Lampung seperti rendahnya angka partisipasi sekolah, masalah guru dan sekolah terpencil, minimnya pendanaan pendidikan, pengurusan adminstrasi guru, dan sebagainya.

Mengingat pelimpahan kewenangan pendidikan (desentralisasi pendidikan) dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi sudah berjalan beberapa tahun (sejak 2016), maka perlu dikaji bagaimana kenyataan yang terjadi berikut harapan ke depan, sehingga dapat dianalisis rasionalitas desentralisasi pendidikan tersebut, apakah masuk pada katagori rasional atau sebaliknya. Teori yang digunakan adalah teori rasionalitas menurut Max Weber (dalam Irwan 2016:20) yang terdiri dari :

1. Rasionalitas Instrumental (*Instrumental Rationality)*
2. Rasionalitas berorientasi pada nilai *(ValueOriented Rationality)*
3. Rasionalitas Afektif (*Affcative Rationality*)
4. Rasionalitas Tradisional (*Traditional Rationality*)



Desentralisasi Pendidikan di Provinsi Lampung

1. Kemampuan daerah dalam membiayai pendidikan
2. Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dari masing-masing daerah
3. Redistribusi kekuatan politik
4. Peningkatan kualitas pendidikan
5. Peningkatan inovasi dalam rangka pemuasan harapan seluruh warga



Rasionalitas Desentralisasi Pendidikan Max Weber (dalam Irwan 2016:20) :

1. Rasionalitas Instrumental (*Instrumental Rationality)*
2. Rasionalitas berorientasi pada nilai *(ValueOriented Rationality)*
3. Rasionalitas Afektif (*Affcative Rationality*)
4. Rasionalitas Tradisional (*Traditional Rationality*)

Rasional

Tidak Rasional

Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian

# BAB III. METODE PENELITIAN

13

A. Tipe Penelitian

Penelitian

Deskriptif Teknik Pengumpulan Kualitatif Informan Data

Peningkatan Kualitas Pendidikan

Lokasi

Fokus Penelitian

Teknik Analisis Data

Rasionalitas

1. Rasionalitas Instrumental (*Instrumental Rationality)*
2. Rasionalitas berorientasi pada nilai *(ValueOriented Rationality)*
3. Rasionalitas Afektif (*Affcative Rationality*)
4. Rasionalitas Tradisional (*Traditional Rationality*)
5. Kemampuan daerah dalam membiayai pendidikan
6. Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dari masing- masing daerah

3.

Redistribusi politik

kekuatan

1. Peningkatan kualitas pendidikan
2. Peningkatan inovasi dalam rangka pemuasan harapan seluruh warga

Desentralisasi Pendidikan :

Gambar 2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah kualitatif deskriptif karena bertujuan untuk menggambarkan secara detil dan menyeluruh berbagai kondisi dan situasi yang timbul yang menjadi objek penelitian. Menurut Poerwandari, K (1998) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara , catatan lapangan, gambar, foto rekaman video dan lain-lain. Melalui pendekatan kualitatif peneliti melakukan representasi objektif mengenai gejala-gejala yang terdapat di dalam masalah penelitian yaitu rasionalisasi desentralisasi pendidikan dengan melihat kenyataan dan harapan. Selanjutnya berdasarkan kenyataan dan harapan tersebut dapat dianalisis apakah desentralisasi pendidikan masih rasional atau tidak. Jika desentralisasi pendidikan ternyata mampu meningkatkan kualitas pendidikan maka masuk kategori masih rasional dan sebaliknya jika dengan desentralisasi pendidikan tersebut belum dapat mencapai tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan maka dapat dikatakan tidak rasional.

Fokus penelitian pada rasionalitas desentralisasi pendidikan berdasarkan teori Max Weber, yaitu :

* 1. Rasionalitas Instrumental (*Instrumental Rationality)*
  2. Rasionalitas berorientasi pada nilai *(ValueOriented Rationality)*
  3. Rasionalitas Afektif (*Affcative Rationality*)
  4. Rasionalitas Tradisional (*Traditional Rationality*)

Informan penelitian secara *purposive.* yaitu pemerintah melalui Dinas Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, guru, murid, orangtua murid, akademisi, dan pemerhati masalah pendidikan. Data diperoleh dari teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan verifikasi/penarikan kesimpulan.

Tahapan penelitian sebagai berikut :

1. Survey Literatur, melalui pengumpulan bahan literatur dan informasi berkaitan dengan tema penelitian.
2. Identifikasi masalah tentang apa yang akan dibahas berkaitan dengan desentralisasi pendidikan dan rasionalitasnya berdasarkan nformasi yang telah diperoleh.
3. Studi pustaka, mempelajari literatur yang akan digunakan sebagai kajian teori. Menentukan variabel dari rasionalitas dan desentralisasi kebijakan. Kemudian menentukan data dan informan.
4. Menentukan dan menyusun Instrumen Penelitian (Panduan wawancara, Observasi Lapangan) dan mengurus perijinan.
5. Mengumpulkan data berdasarkan panduan wawancara. Hal ini dilakukan bersamaan dengan observasi dan perijinan untuk menghemat waktu dan biaya.
6. Pengolahan data, terdiri dari pemberian kode variabel, dan tabulasi.
7. Analisa data hasil pengolahan data berdasarkan hasil penelitian dan teori.
8. Menarik kesimpulan berdasarkan analisa data sesuai dengan tujuan penelitian.

# BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

* 1. **Rasionalitas Kebijakan Desentralisasi di Provinsi Lampung**

Desentralisasi Pendidikan merupakan konsekuensi dari adanya otonomi daerah. Desentralisasi pendidikan merupakan upaya memindahkan penyelenggaraan pendidikan yang semula sentralistik menjadi pendidikan yang sesuai dengan kepentingan daerah atau masyarakat. Paradigma sentralistik pemerintah pusat mendominasi proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi sehingga pusat menjadi pemain utama dalam menentukan berbagai kebijakan pendidikan. Desentralisasi pendidikan merupakan proses pemberian kewenangan yang lebih luas di bidang kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah dan pada saat yang bersamaan kewenangan yang lebih besar diberikan pula kepada sekolah dalam bentuk Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Konsekuensi logis dalam pelaksanaan desentralisasi berdampak pada berbagai sektor, antara lain sektor pendidikan yang notabene menyangkut sistem pendidikan nasional. bahwa konsepsi desentralisasi pendidikan mengandung pengertian yang luas, mencakup filosofi, tujuan, format dan isi pendidikan serta manajemen pendidikan itu sendiri.

Melalui teori Max Weber mengenai rasionalitas Desentralisasi kewenangan pada sektor pendidikan yang dibuat melalui pemerintah pusat ke pemerintah telah menggambarkan kondisi Rasionalitas Instrumental seperti menjamin biaya pendidikan (sekolah gratis), meningkatkan sarana prasaran penunjang pendidikan disetiap daerah, memberikan Beasiswa pendidikan seperti, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan meningkatkan anggara pendidikan melalui bantuan operasional sekolah (BOS). Sehingga hal demikian merupakan bagian dari tujuan dan program pemerintah dalam bidang pendidikan.

Kemudian Rasionalitas berorientasi pada nilai juga telah memberikan kontribusi dalam kehidupan sehari-hari, individu juga dapat menerapkan rasionalitas berorientasi nilai dalam pengambilan keputusan pribadi seperti halnya dalam menentukan masing-masing individu untuk melanjutkan pendidikannya sesuai potensi dan kemauan yang dimiliki dan juga hak untuk tidak melanjutkan

jejang pendidikan masih tergolong stabil pada tingkatan pendidikan dasar di provinsi Lampung.

Pada Rasional Afektif ini menggambarkan kondisi antara objek dari individu pendidikan seperti murid dan juga guru merupakan ujung tombak pendidikan pada level bawah yang secara langsung memahami kondisi pendidikan seperti kondisi murid pada umumnya didorong untuk lebih bebas dalam menentukan dan memilih minat maupun bakat masing-masing individu murid sehingga tujuan desentralisasi pendidikan pada setiap daerah. Kemudian tenaga pendidikan atau guru harus mampu membentuk karakter muridnya selaras dengan merdeka belajar di dunia pendidikan khususnya di Provinsi Lampung.

Kemudian Rasionalitas Tradisional kondisi demikian di provinsi Lampung tidak terlalu signifikan pengaruh nilai tradisional adat, suku, agama dan juga Ras dalam menjalankan desentralisasi pendidikan, namun perlu diketahui masyarakat Lampung pada umumnya cukup tinggi untuk mengedepankan urusan pendidikan khususnya pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi hal itu diperkuat oleh data yang disajikan pada Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kab/Kota di Provinsi Lampung (2019).

# Kenyataan dan Harapan Kebijakan Desentralisasi Pendidikan di Provinsi Lampung

Realitasnya pendidikan di provinsi lampung mengalami perubahan yang cukup drastis dengan melihat sistem pendidikan di Provinsi Lampung telah banyak mengalami pergeseran kualitas pendidikan di Kabupaten/Kota. Pergeseran tersebut sudah mulai muncul dan dapat bersaing dengan sekolah-sekolah yang berkualitas di Kota Bandar Lampung. Hal itu mengacu pada data terkait SMA terbaik di Lampung berdasarkan Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK), SMAN 1 Kota Metro kemudian SMAN 1 Pringsewu, SMA Sugar Grup B Mataram Lampung Tengah dan SMA Kebangsaan Lampung Selatan masuk dalam kategori 10 besar SMA terbaik di Provinsi Lampung. Selain itu juga perlakuan khusus pada kurikulum lokal telah memberikan efek pada sekolah yang ada di Kabupaten yang jauh jaraknya dari ibu kota Provinsi Lampung. Meski demikian semua fasilitas

pendidikan sudah cukup merata dan tersedia di daerah daerah pada 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan juga bisa dilihat dari rata rata banyaknya siswa yang lulus dari Provinsi Lampung dan di terima di Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia.

Mengenai desentralisasi pendidikan yang terjadi di Provinsi Lampung masih sangat perlu penguatan komitmen dari masing-masing daerah terkait dengan tujuan pemerintah pusat agar terseleggaranya dan terciptanya pendidikan yang berkemajuan secara merata dan tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah daerah. Karena pada dasarnya desentralisasi pendidikan mengacu pada dua tujuan besar mengenai *Pertama,* Desentralisasi kewenangan di sektor pendidikan dalam hal kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (provinsi dan distrik). *Kedua,* Desentralisasi pendidikan dengan fokus pada pemberian kewenangan yang lebih besar di tingkat sekolah konsep desentralisasi pendidikan yang pertama terutama berkaitan dengan otonomi daerah dan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah, sedangkan konsep desentralisasi pendidikan yang memfokuskan pada pemberian kewenangan yang lebih besar pada tingkat sekolah dilakukan dengan motivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

# V. KESIMPULAN DAN SARAN

* 1. **Kesimpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi pendidikan rasional, Hal ini ditunjukkan dari rasionalitas instrumental, rasionalitas nilai, rasionalitas afektif yang mendukung berjalannya kebijakan desentralisasi pendidikan. Adanya jaminan biaya pendidikan (sekolah gratis), sarana pendidikan, beasiswa pendidikan dan meningkatnya anggaran pendidikan sangat mendukung berjalannya desentralisasi pendidikan. Individu dapat mengambil keputusan pribadi untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan pendidikannya. Kondisi antara objek dari individu pendidikan seperti murid dan guru merupakan ujung tombak pendidikan pada level bawah. Kemudian tenaga pendidikan atau guru mampu membentuk karakter muridnya selaras dengan merdeka belajar di dunia pendidikan. Hanya pada rasionalitas tradisional tidak berkaitan dengan kebijakan desentralisasi pendidikan di Provinsi Lampung. Nilai tradisional adat, suku, agama dan juga Ras tidak berkaitan dengan berjalannya desentralisasi pendidikan. Namun demikian, masyarakat Lampung pada umumnya cukup tinggi untuk mengedepankan urusan pendidikan khususnya pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.

# Saran

Desentralisasi pendidikan di Provinsi Lampung perlu penguatan komitmen dari masing-masing daerah terkait dengan tujuan pemerintah pusat agar terseleggaranya dan terciptanya pendidikan yang berkemajuan secara merata dan tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah daerah.

# DAFTAR PUSTAKA

Ali, Muhammad. 2017. Kebijakan Pendidikan Menengah Dalam Perspektif Governance Indonesia. Malang: UB Press

Djumali dkk. 2014. Landasan Pendidikan. Yogyakara : Gava Media Hijriati.

Irwan dan Indraddin. 2016. Strategi dan Perubahan Sosial, Yogyakarta :Deepbulish.

Kurniawan, Syamsul. 2017. Pendidikan Karakter: Konsepsi & Implementasinya secara Terpadu di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Poerwandari, E. K. 1998. Pendekatan Kualitatif Dalam penelitian Psikologi. Jakarta

: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3) Fakultas Psikologi

Sunarno, Hukum pemerintahan daerah di Indonesia. 2011. Jakarta. Sinar Grafika, Sutrisno. 2016. Manajemen sumber daya manusia. Jakarta: Kencana.

Trahati, Melia Rimadhani. (2015). Implementasi Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan di Sekolah Dasar Negeri Tritih Wetan 05 Jeruklegi Cilacap. Skripsi. Yogyakarta : Fakultas Ilmu Pendidikan

Utomo, Saddian. 2008. Penanganan pengaduan Masyarakat mengenai pelayanan publik. Jurnal ilmu administrasi dan organisasi. Volume 15, Nomor 3 Sep- Des 2008. P:161-167

**LUARAN ARTIKEL**

**RASIONALITAS KEBIJAKAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN DI PROVINSI LAMPUNG**

**(KENYATAAN DAN HARAPAN)**

**RINGKASAN**

1Feni Rosalia, 2Dian Kagungan

1 Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

2.Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

*Corresponding author:* [*feni.rosalia@fisip.unila.ac.id*](mailto:feni.rosalia@fisip.unila.ac.id)[*diankagungan@gmail.com*](mailto:diankagungan@gmail.com)

Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 9 tahun 2016 mengatur peralihan kewenangan pendidikan dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi. Terdapat beberapa permasalahan seperti rendahnya angka partisipasi sekolah, masalah guru dan sekolah terpencil, minimnya pendanaan pendidikan, pengurusan adminstrasi guru, dan sebagainya. Tulisan ini untuk menggambarkan kenyataan, harapan dan rasionalitas desentralisasi pendidikan, apakah masuk pada katagori rasional atau sebaliknya, dengan menggunakan. teori rasionalitas Max Weber : Rasionalitas Instrumental (*Instrumental Rationality),* Rasionalita nilai *(Value Oriented Rationality),*Rasionalitas Afektif (*Affcative Rationality*), dan Rasionalitas Tradisional (*Traditional Rationality*).

Tipe Penelitian deskriptif kualitatif untuk menggambarkan fenomena kenyataan dan harapan serta rasionalitas desentralisasi pendidikan di Provinsi Lampung. Pengumpulan data melalui wawancara kepada informan secara *purposive.* yaitu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, guru, murid, orangtua murid, akademisi, dan pemerhati masalah pendidikan. Observasi untuk mengkonfirmasi kebijakan desentralisasi pendidikan berproses dalam kegiatan pendidikan.

Hasil penelitian menggambarkan pada kenyataannya kebijakan desentralisasi pendidikan di Provinsi Lampung adalah rasional. Berdasarkan teori instrumental dengan jaminan biaya pendidikan (sekolah gratis), prasarana pendidikan dan beasiswa pendidikan dapat menunjang kemampuan kebijakan desentralisasi. Rasionalitas pada nilai di mana individu dalam pengambilan keputusan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan pendidikannya tergolong stabil pada tingkatan pendidikan dasar di provinsi Lampung. Pada Rasional afektif kondisi antara objek dari individu pendidikan seperti murid dan guru merupakan ujung tombak pendidikan pada level bawah, tenaga pendidikan harus membentuk karakter muridnya selaras dengan merdeka belajar di dunia pendidikan. Tetapi pada rasionalitas tradisional yaitu adat, suku, dan agama tidak berpengaruh pada kebijakan desentralisasi pendidikan. Harapan ke depan bahwa desentralisasi pendidikan di Provinsi Lampung perlu penguatan komitmen dari setiap daerah agar terselenggara pendidikan yang berkemajuan secara merata dan tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah daerah.

Kata Kunci : Rasionalitas, Desentralisasi Pendidikan

**Pendahuluan**

**Latar Belakang Masalah**

Desentralisasi Pemerintahan pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, suatu masyarakat yang lebih adil dan lebih sejahtera. Menurut Undang-Undang Pemerintah Daerah nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintah Pusat kepada daerah berdasarkan asas otonom, sehingga ketentuan ini menjadi dasar hukum terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam menjalankan urusan-urusannya. Indonesia merupakan Negara yang menerapkan sistem desentralisasi yang pada hakikatnya desentralisasi adalah hak otonomisasi suatu masyarakat dalam wilayah tertentu. Pemerintah daerah dianggap dapat lebih memahami keinginan penduduk lokal sehingga pengambilan keputusan dalam penyediaan pelayanan lebih responsif terhadap permintaan masyarakat (Utomo 2008: 78).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana Pemerintahan meletakkan titik berat otonomi pada daerah kabupaten dan daerah kota dengan tujuan untuk lebih mendekatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat (pelayanan publik) dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, aman, dan demokratis sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

UUD 1945 Pasal 31 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan sehat. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan ketentuan Pasal

12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pendidikan merupakan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemerintah sebagai instansi penyedia pelayanan publik wajib menyusun standar pelayanan masing-masing sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Adanya perubahan Undang-Undang dari UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membuat beberapa kebijakan ikut mengalami perubahan. Salah satunya terkait pengelolaan pendidikan menengah yang semula dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota beralih menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Ketentuan terkait kewenangan pendidikan menengah ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMK/SMA) Dari Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung.

Sejak terjadinya peralihan kewenangan pendidikan pada tahun 2016, di satu sisi memberikan keuntungan bagi pemerintah kabupaten/kota, karena dapat lebih fokus kepada pengelolaan pendidikan dasar saja, sedangkan pemerintah provinsi dapat menangani pendidikan menengah. Namun, tetap saja hal ini menimbulkan pendapat pro kontra dari berbagai pihak, seperti orang tua murid maupun para tenaga pendidik. Hal ini karena terdapat berbagai perubahan kebijakan yang dirasa belum sepenuhnya berjalan optimal.

Melihat kondisi pendidikan di Provinsi Lampung belum sepenuhnya berada dalam kondisi yang baik. Terdapat beberapa daerah berada dalam Indeks Pertumbuhan Masyarakat (IPM) masih rendah.2 Hal ini mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Kabupaten berupaya meningkatkan IPM kategori Pendidikan agar masyarakat berada dalam kondisi yang maju dalam level pendidikannya.

**Tabel 1. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kab/Kota di Provinsi Lampung (2019)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kabupaten/ Kota** | **% (SD)** | **% (SMP)** | **% (SMA)** |
| 1. | Lampung Selatan | 99,80 | 93,42 | 75,90 |
| 2. | Lampung Barat | 100 | 95,25 | 69,29 |
| 3. | Pesawaran | 100 | 96,08 | 71,88 |
| 4. | Pringsewu | 99,62 | 98,68 | 74,08 |
| 5. | Lampung Timur | 99,80 | 94,61 | 66,58 |
| 6. | Lampung Tengah | 99,74 | 96,43 | 68,56 |
| 7. | Way Kanan | 99,82 | 96,31 | 67,70 |
| 8. | Tulang Bawang Barat | 99,67 | 93,18 | 74,44 |
| 9. | Lampung Utara | 99,84 | 94,78 | 72,41 |
| 10. | Tulang Bawang | 99,73 | 94,23 | 68,85 |
| 11. | Bandar Lampung | 99,98 | 98,24 | 76,86 |
| 12. | Metro | 99,90 | 95,31 | 84,09 |
| 13. | Mesuji | 99,26 | 89,36 | 64,15 |
| 14. | Tanggamus | 99,56 | 90,95 | 72,02 |
| 15. | Pesisir Barat | 99,80 | 86,73 | 65,85 |

*(Sumber: BPS Provinsi Lampung 2019)*

2 <https://ipm.bps.go.id/data/kabkot/metode/baru/1881>

Seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan, Angka Partisipasi Sekolah (APS) cenderung menurun. Pada jenjang SMA/sederajat ke atas misalnya, kabupaten/kota berkisar antara 64-84 persen. Hasil angka partisipasi sekolah di Provinsi Lampung tahun 2019 dapat dilihat bahwa Kabupaten Mesuji berada dalam persentase terendah mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sedangkan di daerah kota, APS relatif lebih tinggi di Kota Metro mencapai 84 persen sementara di Kota Bandar Lampung hampir 77 persen.

Sampai saat ini masih banyak permasalahan terkait pendidikan di Provinsi Lampung. Masih rendahnya minat pendidikan di Provinsi Lampung antara lain karena ketidakmampuan ekonomi rumah tangga, aksesibilitas sarana pendidikan, pendidikan orang tua, kualitas guru, dan lainnya. Berbagai argumentasi disampaikan terkait permasalahan tersebut. Ada yang berpandangan bahwa masalah pendidikan di Lampung akibat peralihan kewenangan pendidikan dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi Lampung. Sebagian masyarakat juga beranggapan bahwa peralihan kewenangan tersebut justru membawa pendidikan di Provinsi Lampung menjadi semakin maju.

Mengingat masih adanya pro kontra di masyarakat tentang alih kewenangan pendidikan dari Kabupaten/Kota kepada provinsi ditambah dengan banyaknya permasalahan pendidikan seperti angka partisipasi sekolah yang masih rendah, ketidakmerataan pendidikan di daerah terpencil, akses pengurusan administratif para guru di daerah, dan lain-lain maka perlu dilihat rasionalitas kebijakan desentralisasi pendidikan, sampai sejauh ini bagaimana perkembangannya, apa yang menjadi kenyataan dan bagaimana pula harapan ke depannya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka tulisan ini bertujuan untuk mengkaji mengenai kenyataan yang terjadi sejak berlakunya kebijakan desentralisasi pendidikan di Provinsi Lampung, bagaimana rasionalitas kebijakan tersebut, serta harapan ke depan berkaitan dengan desentralisasi pendidikan di Provinsi Lampung. Hasil kajian ini bermanfaat untuk menambah wawasan Ilmu Pemerintahan yang berkaitan dengan kebijakan desentralisasi pendidikan dan bagi pihak yang berminat terhadap perkembangan dunia pendidikan di Indonesia dalam kaitannya dengan kebijakan desentralisasi pendidikan tersebut.

Penyerahan urusan pemerintahan lebih lanjut menurut (Sunarno. 2011:87) menjelaskan bahwa desentralisasi berarti pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkup pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Sedangkan pendidikan Menurut Djumali dkk (2014: 1), adalah untuk mempersiapkan manusia dalam memecahkan problem kehidupan di masa kini maupun di masa yang akan datang”, yang kemudian menurut Sutrisno (2016: 29), pendidikan meliputi unsur saling bertautan satu dengan lain. Pendidikan adalah proses peralihan pengetahuan, pengalaman dan keterampilan dari generasi tua kepada kaum muda (Kurniawan, 2017: 26) dan pendidikan merupakan kegiatan secara sadar dan terpogram (Trahati, 2015: 11).

Desentralisasi pendidikan adalah sistem pengaturan pelaksanaan pendidikan yang diserahkan kepada masing-masing daerah otonom. Ali (2017: 31) mengatakan bahwa sistem desentralisasi pendidikan adalah kebijakan yang tepat diterapkan di Indonesia, alasannya adalah: kemampuan daerah dalam membiayai pendidikan, peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dari masing-masing daerah, redistribusi kekuatan politik, peningkatan

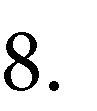
kualitas pendidikan, dan peningkatan inovasi dalam rangka pemuasan harapan seluruh warga. Sedangkan rasionalitas menurut Max Weber (dalam Irwan 2016:20) merupakan tindakan rasional berhubung dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan.atas dasar rasionalitas tindakan sosial. Dalam rasionalitas individu menganggap keteraturan sosial adalah resultan kompleks dari tindakan individu (Scott, 2012:54).

Alur berpikir tulisan ini adalah sebagai berikut :



Desentralisasi Pendidikan di Provinsi Lampung

1. Kemampuan daerah dalam membiayai pendidikan
2. Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dari masing-masing daerah
3. Redistribusi kekuatan politik
4. Peningkatan kualitas pendidikan
5. Meningkatan inovasi dalam rangka pemuasan harapan seluruh warga



Rasionalitas Desentralisasi Pendidikan Max Weber (dalam Irwan 2016:20) :

1. Rasionalitas Instrumental (*Instrumental Rationality)*
2. Rasionalitas berorientasi pada nilai *(ValueOriented Rationality)*
3. Rasionalitas Afektif (*Affcative Rationality*) Rasionalitas Tradisional (*Traditional Rationality*)

Rasional

Tidak Rasional

**Metode Penelitian**

Tipe Penelitian

Penelitian

Deskriptif Teknik Pengumpulan

Kualitatif Informan Data

Peningkatan Kualitas Pendidikan

Lokasi

Fokus Penelitian

Teknik Analisis Data

Rasionalitas

1. Rasionalitas Instrumental (*Instrumental Rationality)*
2. Rasionalitas berorientasi pada nilai *(ValueOriented Rationality)*
3. Rasionalitas Afektif (*Affcative Rationality*)
4. Rasionalitas Tradisional

(*Traditional Rationality*)

Desentralisasi Pendidikan :

1. Kemampuan daerah dalam membiayai pendidikan
2. Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dari masing- masing daerah
3. Redistribusi kekuatan politik
4. Peningkatan kualitas pendidikan
5. Peningkatan inovasi dalam rangka pemuasan harapan seluruh warga

Tipe penelitian adalah kualitatif karena menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara , catatan lapangan, gambar, foto rekaman video dan lain- lain (Poerwandari,1998). Melalui pendekatan kualitatif peneliti melakukan representasi objektif mengenai gejala-gejala yang terdapat di dalam masalah penelitian yaitu rasionalisasi desentralisasi pendidikan dengan melihat kenyataan dan harapan. Selanjutnya berdasarkan kenyataan dan harapan tersebut dapat dianalisis apakah desentralisasi pendidikan masih rasional atau tidak. Jika desentralisasi pendidikan ternyata mampu meningkatkan kualitas pendidikan maka masuk kategori masih rasional dan sebaliknya jika dengan desentralisasi pendidikan tersebut belum dapat mencapai tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan maka dapat dikatakan tidak rasional.

Fokus penelitian pada rasionalitas desentralisasi pendidikan. Konsep rasionalitas menurut Weber bahwa tindakan sosial, apapun wujudnya hanya dapat dimengerti menurut arti subjektif dan motivasi apa yang mendasarinya. Artinya, setiap tindakan yang dilakukan oleh individu hanya individu itu sendiri yang mengerti. Berdasarkan teori Max Weber rasionalitas dapat dilihat dari (Irwan 2016 : 20) :

c. Rasionalitas Instrumental (*Instrumental Rationality),* tindakan ditentukan atas dasar harapan yang memiliki tujuan untuk dicapai dan menentukan nilai dari tujuan itu sendiri. Tindakan dapat dipahami karena itu dapat dikatakan rasional. Tujuan tindakan adalah menentukan alat dan tujuan yang akan digunakan dalam mencapai suatu tujuan yang akan dicapai.

1. Rasionalitas berorientasi pada nilai (Value Oriented Rationality), tindakan dalam rasionalitas ada pada nilai sebagai potensi atau tujuan hidup, walaupun tujuan tidak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan yang dilakukan oleh seseorang bukan hanya menilai cara yang baik, tetapi menentukan nilai tujuan tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh aktor ada nilai-nilai yang dianut dan dijadikan pegangan hidup mereka. Tindakan yang didasarkan oleh kesadaran keyakinan mengenai nilai-nilai yang penting seperti etika, estetika, agama dan nilai-nilai lainnya yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Tindakan ini termasuk kedalam tindakan yang rasional sebab tindakan ini masih dapat dipahami.
2. Rasionalitas Afektif (*Affcative Rationality*), tindakan yang ditentukan oleh kondisi kejiwaan dan perasaan individu yang melakukannya. Tindakan ini dilakukan seseorang berdasarkan perasaan yang dimilikinya, biasanya timbul secara spontan begitu mengalami suatu kejadian. Untuk tindakan yang didasari atas perasaan individu ini sukar dipahami sebab kurang rasional.
3. Rasionalitas Tradisional (*Traditional Rationality*), bertujuan untuk memperjuangkan tradisi atau nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat selama masyarakat itu berada. Hal tersebut mempertahankan suatu kebudayaan atau nilai yang diyakini dan ditekuni ketika individu melakukan tindakan oleh masyarakat telah menjadi darah daging. Tipe tindakan yang dilakukan yaitu memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang dan atas dasar tradisi atau adat istiadat tindakan ini pun sukar dipahami karena kurang rasional dan menempatkan masyarakat dalam situasi yang kompetitif, anonim dan terbagi-bagi.

Informan penelitian secara *purposive* yaitu pemerintah melalui Dinas Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, guru, murid, orangtua murid, akademisi, dan pemerhati masalah pendidikan. Data diperoleh dari teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan verifikasi/penarikan kesimpulan.

**Hasil Penelitian**

Desentralisasi Pendidikan merupakan konsekuensi dari adanya otonomi daerah. Desentralisasi pendidikan merupakan upaya memindahkan penyelenggaraan pendidikan yang semula sentralistik menjadi pendidikan yang sesuai dengan kepentingan daerah atau masyarakat. Paradigma sentralistik pemerintah pusat mendominasi proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi sehingga pusat menjadi pemain utama dalam menentukan berbagai kebijakan pendidikan. Desentralisasi pendidikan merupakan proses pemberian kewenangan yang lebih luas di bidang kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah dan pada saat yang bersamaan kewenangan yang lebih besar diberikan pula kepada sekolah dalam bentuk Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Konsekuensi logis dalam pelaksanaan desentralisasi berdampak pada berbagai sektor, antara lain sektor pendidikan yang notabene menyangkut sistem pendidikan nasional. bahwa konsepsi desentralisasi pendidikan mengandung pengertian yang luas, mencakup filosofi, tujuan, format dan isi pendidikan serta manajemen pendidikan itu sendiri.

Maka berdasarkan pendekatan melalui teori Max Weber mengenai rasionalitas Desentralisasi kewenangan pada sektor pendidikan yang dibuat melalui pemerintah pusat ke pemerintah telah menggambarkan kondisi Rasionalitas Instrumental seperti menjamin biaya pendidikan (sekolah gratis), meningkatkan sarana prasaran penunjang pendidikan disetiap daerah, memberikan Beasiswa pendidikan seperti, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan meningkatkan anggara pendidikan melalui bantuan operasional sekolah (BOS). Sehingga hal demikian merupakan bagian dari tujuan dan program pemerintah dalam bidang pendidikan. Kemudian Rasionalitas berorientasi pada nilai juga telah memberikan kontribusi dalam kehidupan sehari-hari, individu juga dapat menerapkan rasionalitas berorientasi nilai dalam pengambilan keputusan pribadi seperti halnya dalam

menentukan masing-masing individu untuk melanjutkan pendidikannya sesuai potensi dan kemauan yang dimiliki dan juga hak untuk tidak melanjutkan jejang pendidikan masih tergolong stabil pada tingkatan pendidikan dasar di provinsi Lampung.

Pada Rasional Afektif ini menggambarkan kondisi antara objek dari individu pendidikan seperti murid dan juga guru merupakan ujung tombak pendidikan pada level bawah yang secara langsung memahami kondisi pendidikan seperti kondisi murid pada umumnya didorong untuk lebih bebas dalam menentukan dan memilih minat maupun bakat masing-masing individu murid sehingga tujuan desentralisasi pendidikan pada setiap daerah. Kemudian tenaga pendidikan atau guru harus mampu membentuk karakter muridnya selaras dengan merdeka belajar di dunia pendidikan khususnya di Provinsi Lampung.

Kemudian Rasionalitas Tradisional kondisi demikian di provinsi Lampung tidak terlalu signifikan pengaruh nilai tradisional adat, suku, agama dan juga Ras dalam menjalankan desentralisasi pendidikan, namun perlu diketahui masyarakat Lampung pada umumnya cukup tinggi untuk mengedepankan urusan pendidikan khususnya pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi hal itu diperkuat oleh data yang disajikan pada Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kab/Kota di Provinsi Lampung (2019).

Dengan demikian realitasnya pendidikan di provinsi lampung mengalami perubahan yang cukup drastis dengan melihat sistem pendidikan di Provinsi Lampung telah banyak mengalami pergeseran kualitas pendidikan di Kabupaten/Kota. Pergeseran tersebut sudah mulai muncul dan dapat bersaing dengan sekolah-sekolah yang berkualitas di Kota Bandar Lampung. Hal itu mengacu pada data terkait SMA terbaik di Lampung berdasarkan Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK), SMAN 1 Kota Metro kemudian SMAN 1 Pringsewu, SMA Sugar Grup B Mataram Lampung Tengah dan SMA Kebangsaan Lampung Selatan masuk dalam kategori 10 besar SMA terbaik di Provinsi Lampung. Selain itu juga perlakuan khusus pada kurikulum lokal telah memberikan efek pada sekolah yang ada di Kabupaten yang jauh jaraknya dari ibu kota Provinsi Lampung. Meski demikian semua fasilitas pendidikan sudah cukup merata dan tersedia di daerah daerah pada 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan juga bisa dilihat dari rata rata banyaknya siswa yang lulus dari Provinsi Lampung dan di terima di Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia.

Mengenai desentralisasi pendidikan yang terjadi di Provinsi Lampung masih sangat perlu penguatan komitmen dari masing-masing daerah terkait dengan tujuan pemerintah pusat agar terseleggaranya dan terciptanya pendidikan yang berkemajuan secara merata dan tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah daerah. Karena pada dasarnya desentralisasi pendidikan mengacu pada dua tujuan besar mengenai *Pertama,* Desentralisasi kewenangan di sektor pendidikan dalam hal kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (provinsi dan distrik). *Kedua,* Desentralisasi pendidikan dengan fokus pada pemberian kewenangan yang lebih besar di tingkat sekolah konsep desentralisasi pendidikan yang pertama terutama berkaitan dengan

otonomi daerah dan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah, sedangkan konsep desentralisasi pendidikan yang memfokuskan pada pemberian kewenangan yang lebih besar pada tingkat sekolah dilakukan dengan motivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

**Kesimpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi pendidikan rasional, Hal ini ditunjukkan dari rasionalitas instrumental, rasionalitas nilai, rasionalitas afektif yang mendukung berjalannya kebijakan desentralisasi pendidikan. Adanya jaminan biaya pendidikan (sekolah gratis), sarana pendidikan, beasiswa pendidikan dan meningkatnya anggaran pendidikan sangat mendukung berjalannya desentralisasi pendidikan. Individu dapat mengambil keputusan pribadi untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan pendidikannya. Kondisi antara objek dari individu pendidikan seperti murid dan guru merupakan ujung tombak pendidikan pada level bawah. Kemudian tenaga pendidikan atau guru mampu membentuk karakter muridnya selaras dengan merdeka belajar di dunia pendidikan. Hanya pada rasionalitas tradisional tidak berkaitan dengan kebijakan desentralisasi pendidikan di Provinsi Lampung. Nilai tradisional adat, suku, agama dan juga Ras tidak berkaitan dengan berjalannya desentralisasi pendidikan. Namun demikian, masyarakat Lampung pada umumnya cukup tinggi untuk mengedepankan urusan pendidikan khususnya pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.

**5.2. Saran**

Desentralisasi pendidikan di Provinsi Lampung perlu penguatan komitmen dari masing-masing daerah terkait dengan tujuan pemerintah pusat agar terseleggaranya dan terciptanya pendidikan yang berkemajuan secara merata dan tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah daerah.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ali, Muhammad. 2017. Kebijakan Pendidikan Menengah Dalam Perspektif Governance Indonesia.

Malang: UB Press

Djumali dkk. 2014. Landasan Pendidikan. Yogyakara : Gava Media Hijriati.

Irwan dan Indraddin. 2016. Strategi dan Perubahan Sosial, Yogyakarta :Deepbulish.

Kurniawan, Syamsul. 2017. Pendidikan Karakter: Konsepsi & Implementasinya secara Terpadu di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Poerwandari, E. K. 1998. Pendekatan Kualitatif Dalam penelitian Psikologi. Jakarta : Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3) Fakultas Psikologi

Sunarno, Hukum pemerintahan daerah di Indonesia. 2011. Jakarta. Sinar Grafika, Sutrisno. 2016. Manajemen sumber daya manusia. Jakarta: Kencana.

Trahati, Melia Rimadhani. (2015). Implementasi Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan di Sekolah Dasar Negeri Tritih Wetan 05 Jeruklegi Cilacap. Skripsi. Yogyakarta : Fakultas Ilmu Pendidikan

Utomo, Saddian. 2008. Penanganan pengaduan Masyarakat mengenai pelayanan publik. Jurnal ilmu administrasi dan organisasi. Volume 15, Nomor 3 Sep-Des 2008. P:161-167

